

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan Kepala Desa Periode 2019-2024 Dalam Pemberdayaan Ekonomi Guna Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan observasi Desa Krakitan Kecamatan Bayat menyimpan potensi wisata yang cukup menarik, selain warung apungnya yang berada di Rowo Jombor dengan pemandangan yang indah pada sore hari tampak menarik, terbukti dengan banyaknya warga yang sering mengunjungi di pinggir rawa sembari melihat pemandangan sunset (matahari terbenam) (<http://kabarklaten.com/>). Ada Bukit Sidoguro yang terletak di Nglebak, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang Instagrammable di Klaten. Objek wisata yang di resmikan pada 29 Desember 2019 ini memiliki pohon-pohon buatan menyerupai payung mirip Gardens by The Bay-nya Singapura. Pada puncak bukit dilengkapi dengan beberapa spot selfi (<https://www.kompasiana.com/>). Selain itu ada juga Bukit Patrum merupakan tempat bekas tambang gamping, yang pada 28 Oktober 2017 diresmikan oleh pemerintah setempat sebagai tempat wisata dengan nama yakni Photarium Bukit Patrum (<https://www.travel.tribunnews.com/>). Pada tanggal 28 Oktober 2017 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA. mendeklarasikan bahwa Desa Krakitan termasuk diantara tiga desa sebagai Desa Politan Desa Wisata. Dua desa lain yakni Desa Jomboran dan Desa Jimbung (<https://beritaklaten.com/>). Itulah beberapa pesona dari desa wisata Krakitan.

Untuk pengembangan desa wisata, industri rumah yang dapat dikembangkan, dan peran serta masyarakat juga peran serta pemerintahan desa untuk memberdayakan ekonomi Desa Krakitan.

Kepemimpinan adalah hubungan dimana seseorang (pemimpin) mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan pemimpin dan bawahannya (Amirullah, 2004). Definisi tersebut menekankan pada permasalahan hubungan antara orang yang mempengaruhi (pemimpin) dengan orang yang dipengaruhi (bawahan). Dari definisi tersebut maka dapat diartikan kepemimpinan dalam konteks struktural tidak hanya terikat pada bidang atau sub bidang yang menjadi tugas dan fungsinya, tetapi juga oleh rumusan tujuan dan program pencapaian yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang lebih tinggi posisinya.

Seorang pemimpin dituntut agar dapat memenuhi suatu persyaratan dalam melaksanakan suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Lebih dari pada itu, seorang pemimpin juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas. Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, maka dipandang penting seorang pemimpin untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadiannya, supaya dapat memotivasi orang-orang yang dipimpin agar melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkannya.

Desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat. Kepala desa mempunyai peran penting secara aktif membina dan menempatkan para aparatur desa untuk meningkatkan produktivitas. Kepala desa merupakan komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kantor desa, administrasi, pembinaan aparatur desa dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala desa, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien (Lamangida, 2018).

Desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat. Kepala desa mempunyai peran penting secara aktif membina dan menempatkan para aparatur desa untuk meningkatkan produktivitas. Kepala desa merupakan komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kantor desa, administrasi, pembinaan aparatur desa dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala desa, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien.² Keberhasilan suatu organisasi bergantung pada produktivitas yang dimiliki baik secara perorangan ataupun tim didalam organisasi tersebut. Menurut

Hasibuan produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutarakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa (Hasibuan, 2010). Dari pemahaman diatas dapat dikatakan bahwa produktivitas menyentuh berbagai aspek dalam diri manusia seperti sikap, mental, etika dan keahlian sehingga dapat dijadikan sebagai pendorong dalam meningkatkan mutu untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Produktivitas merupakan faktor yang sangat penting untuk kelangsungan perusahaan karena merupakan faktor kunci untuk dapat melakukan perbaikan setiap hari dan hanya tenaga kerja yang dapat meningkatkan produktivitas.

Tugas utama aparatur adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Jelas digariskan dalam UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional yang multidimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan sampai di tingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Desa merupakan sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat pemerintahan terendah tersebut, dan salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya

Pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Peranan mereka demikian penting dan menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Maka diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkungan suatu masyarakat harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang telah

ditentukan. Kepemimpinan dalam lingkungan satuan desa harus melibatkan upaya seorang kepala desa untuk mempengaruhi perilaku para perangkat desa dalam suatu situasi. Kepala desa dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala desa bukan saja harus memiliki wibawa tetapi harus memiliki kesanggupan untuk menggunakan wibawanya terhadap para perangkat supaya diperoleh atau memunculkan kinerja perangkat yang baik. Azas-azas yang perlu ditetapkan dalam sebuah lembaga adalah pembagian tugas. Indikator yang harus diperhatikan dalam azas pembagian tugas ini adalah kemampuan dari individu-individu yang diserakan tugas. Maka dalam suatu lembaga perlu adanya manajemen efektif yang mampu mengarahkan dan membina perilaku lembaga dan administrasi.

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja individu, tim atau organisasi terletak pada produktivitasnya. Apabila produktivitasnya tinggi atau bertambah, dinyatakan berhasil. Apabila lebih rendah dari standar atau menurun, dikatakan tidak atau kurang sukses. Pentingnya produktivitas kerja karyawan ini ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan maupun unit usaha masyarakat untuk menjalankan dan pengembangan usahanya.

Pemikiran tersebut diatas, dikaitkan dengan kondisi sementara Pemerintah Desa Krakitan dimana warga desa Krakitan memiliki persamaan visi dengan kepala desa, BPD dan juga pemerintah bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memajukan Desa

Krakitan. Desa Krakitan memiliki sejumlah dusun yang sangat berpotensi untuk menjadi sarana wisata belajar. Disana terdapat berbagai macam potensi, seperti peternakan, perikanan, kesenian, kerajinan batik, gerabah, seni ukir kayu, perkebunan atau hortikultura, dan lain-lain. Berbagai potensi tersebut sangat cocok untuk menjadi sarana pembelajaran, bukan hanya bagi para siswa sekolah, tetapi juga masyarakat pada umumnya yang ingin secara langsung mempraktekkan dan mengenal cara-cara bertani, berternak, dan sebagainya. Lokasi desa Krakitan, diapit oleh bukit-bukit kapur, yang dapat menjadi sarana bagi mereka pecinta panjat tebing, tracking, dan mereka yang tertarik untuk mempelajari mengenai berbagai macam batuan, seperti batuan beku, sedimen, dan sebagainya.

Keadaan demografis Desa Krakitan juga sangat menarik. Hal tersebut mulai dari keramahan setiap penduduknya, semangat gotong royong yang tinggi, hingga sikap religius warganya. Sikap penduduk yang ramah dan terbuka bagi masyarakat luar atau pendatang menambah rasa nyaman bagi para wisatawan yang datang. Dengan demikian, wisatawan diharapkan dapat merasakan suasana desa yang akrab serta mendapat pengalaman yang berbeda saat berwisata di Desa Krakitan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya memiliki pemberdayaan ekonomi yang baik, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut akan terwujud apabila

urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Perangkat desa dan kepala desa merupakan basis pelayanan masyarakat terendah. Tinggi rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan bukan hanya tergantung pada kinerja para perangkat desa saja selaku bawahan, tetapi juga pemimpinnya. Kepemimpinan seseorang akan menentukan maju atau mundurnya, hidup atau mati organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai karakteristik kepemimpinan yang efektif, mempunyai suatu karakter kepemimpinan tertentu, sebagai pencerminan dari kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan yang muncul dari dalam diri sendiri menunjukkan efektif atau tidaknya kepemimpinannya.

Mengingat pentingnya kepemimpinan sebagai faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi dan usaha. Pemerintahan desa seperti halnya pemerintah pusat dan daerah, dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan mampu menjawab tuntutan yang makin tinggi dari masyarakat, baik dari kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Akan tetapi, pemerintahan yang ada di Desa Krakitan ini masih belum maksimal karena ada beberapa kendala yang menghambat berjalannya pelayanan tersebut, diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar yang kurang diperhatikan oleh pemerintah

desa. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa ini kurang tersalurkan dengan baik. Salah satu kasus yang ada adalah beberapa pelaku umkm yang tidak menerima bantuan dari pemerintah desa, namun justru masyarakat yang berkecukupan yang mendapat bantuan. Selain itu, dari adanya beberapa pelaku usaha umkm yang menggunakan lahan di sekitar rowo jombor dengan seadanya. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, tetapi penelitian ini akan lebih fokus pada kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan kinerja perangkat desa dipimpin oleh kepala desa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pemimpin desa dalam meningkatkan produktivitas kinerja aparatur di pemerintahan desa. Adapun judul penelitian ini ialah “Kepemimpinan Kepala Desa Periode 2019-2024 Dalam Pemberdayaan Ekonomi Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa periode 2019-2024 dalam pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa periode 2019-2024 dalam pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.3.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa periode 2019-2024 dalam pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

1.3.3 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu bagi peneliti tentang kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penelitian ini dapat digunakan oleh instansi instansi terkait, pemerintah, masyarakat yang membutuhkan data/informasi mengenai kepemimpinan Kepala Desa periode 2019-2024 dalam pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, selain itu penelitian ini juga dapat digunakan menjadi gambaran dan contoh suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang mempengaruhi bawahannya.

1.4 Literatur Review

Hasil penelitian yang relevan digunakan peneliti untuk menghindari pengulangan kajian akan hal-hal yang dianggap sama. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Penelitian yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (Studi Kasus Kepemimpinan Empat Kelurahan di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta)” oleh (Hidayati, 2018) di Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta. Dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan empat kepala desa yang memimpin di empat kelurahan yang memiliki pengembangan diri serta proses yang berbeda dalam menerapkan gaya kepemimpinan

yang ada di masing-masing kelurahannya. Gaya kepemimpinan yang diterapkan tersebut dipengaruhi oleh pembentukan dan pengembangan individu yang diperoleh dari proses sebelum menjadi pemimpin yaitu karakter individu yang kemudian diterapkan setelah menjadi seorang pemimpin.

Penelitian yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa” ditulis oleh (Sartono & Manguntara, 2018), Universitas Halu Oleo Kendari . Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum gaya kepemimpinan kepala desa Latungo terdiri dari lima aspek yaitu konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi. Partisipasi masyarakat desa Latugho cukup baik dimana terlihat dari partisipasi masyarakat saat melakukan perencanaan yang mana masyarakat sangat menunjukkan antusias yang tinggi, tetapi tidak diimbangi pengajuan ide-ide saat ikut rapat yang selanjutnya partisipasi masyarakat tersebut tergolong dalam partisipasi materi dan partisipasi secara tenaga masih tergolong sangat rendah.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa ditinjau dari Ekonomi Islam” Oleh (Aisia, 2017) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena baik

buruknya partisipasi masyarakat bergantung pada pemimpinnya. Dengan Rumusan masalah bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat yang mana kepala desa di Kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah menggunakan Gaya kepemimpinan yang demokratis. Dimana gaya ini dianggap sangat efektif dalam membangun partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Selain itu gaya ini memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan kepemimpinan dalam Islam yaitu amanah, adil dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

Penelitian yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan (Studi Gaya Kepemimpinan di Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)” oleh (Masruhin, 2015) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui fakta-fakta tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Maron Kulon Kecamatan Maro Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan tipe pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala maupun keadaan dengan menggambarkan atau menguraikan, dan menginterpretasikannya ke dalam suatu bentuk tulisan

yang sistematis. Hasil penelitian ini yaitu didapatkan kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yaitu gaya kepemimpinan yang demokratis. Proses penyelenggaraan pembangunan tersebut dilakukan kepala desa tidak bersifat otoriter tetapi kepala desa mengumpulkan terlebih dahulu orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut, kemudian diadakanlah rapat yang pada akhirnya ditentukan sebuah keputusan yang disetujui bersama.

Penelitian yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor)” yang disusun oleh (Milad, 2016) di Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Tahun. Penelitian ini diawali karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa pembangunan desa belum mencerminkan pembangunan yang partisipatif. Kondisi ini memerlukan dukungan kepemimpinan, yakni kepala desa sebagai figur pemimpin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dominan dengan tingkat partisipasi masyarakat, menganalisis hubungan antara faktor internal dengan tingkat partisipasi masyarakat, dan menganalisis hubungan antara faktor eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten

Bogor. Metode yang digunakan adalah pendekatan survey yang didukung data kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini diolah menggunakan *Rank Spearman* dan *Chi-Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan partisipatif dengan tingkat partisipasi. Pada faktor internal terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Pada faktor eksternal terdapat hubungan yang positif antara tingkat transparansi dan intensitas komunikasi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur jalan.

Ranny Lendo dalam penelitian yang berjudul “Kinerja Aparat Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Wuwuk Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan” (Lendo, 2019). Hasil dari penelitian ini untuk mewujudkan efektivitas pelayanan umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan, terlepas dari pengaruh kualitas disiplin kerja aparat pemerintah setempat. Dengan kualitas disiplin kerja aparat pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Proses pelayanan umum cenderung ditentukan oleh tingkat kedisiplinan aparat dalam melayani kepentingan masyarakat. Adanya disiplin kerja yang baik akan menciptakan interaksi yang harmonis, baik antara aparat dengan sesama aparat birokrasi maupun antara aparat dengan masyarakat.

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa (Studi Gaya Kepemimpinan Demokratis di Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran) oleh (Khasanah, 2015) Nur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2015. Seorang pemimpin yang demokratis, diperlukan dalam setiap penyelenggaraan pembangunan. Termasuk pula di dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa, sehingga dengan adanya pemimpin yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, harapannya setiap desa yang selama ini mengalami ketertinggalan dalam aspek pembangunan mampu untuk segera mengejar ketertinggalannya tersebut. Sehingga desa yang bersangkutan dapat lebih maju dan berkembang, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gaya kepemimpinan demokratis kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sosial tertentu di Desa Cimanuk melalui gaya-gaya kepemimpinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan desa gaya kepemimpinan demokratis di Desa Cimanuk belum semuanya berjalan optimal, hal ini diakibatkan karena adanya hambatan pelayanan dari kepala desa dan aparatnya sendiri. Namun desa ini memiliki tingkatan

kekerabatanyang kuat, solidaritas yang tinggi, sehingga hal ini menjadi modal bagi jalannya menuju pembangunan desa yang baik

Gaya Kepemimpinan Lurah Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi pada Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang) oleh (Aprilianti, Pratiwi, & Rengu, 2019) dalam Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 96-101) Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat (community development) sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Proses pemerintahan yang baik tercermin dari kepemimpinan seorang pemimpinnya. Kepemimpinan seorang pemimpin merupakan hal penting dalam mengorganisir masyarakat didaerahnya agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pemimpin dapat menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat yang dipimpinnya dengan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis gaya kepemimpinan Lurah Sukun Kota Malang dan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Sukun dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Lurah Sukun Kota Malang adalah gaya kepemimpinan demokratis. Partisipasi warga tercipta melalui gotong-royong pembangunan jalan, kerja bakti lingkungan, perumusan perencanaan

pembangunan Kelurahan serta dengan adanya saran yang selalu di ungkapkan masyarakat kepada Lurah untuk terciptanya Kelurahan yang lebih baik.

Penelitian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat) oleh (Sartono & Manguntara, S. Sos, M.A, 2018)” Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum gaya kepemimpinan Kepala Desa Latugho terdiri dari lima aspek yaitu konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi. Dari aspek konsultasi, Kepala Desa Latugho menunjukkan sudah mampu berkonsultasi dengan bawahan sebagai pimpinan desa, keputusan bersama Kepala Desa Latugho selalu memutuskan sesuatu dengan musyawarah bersama staf-stafnya pada saat rapat dikategorikan sudah baik. Aspek pembagian kekuasaan sudah mampu menunjukkan sebagai unsur pemerintah desa bekerja sama dengan badan pemberdayaan desa dalam pembangunan dikategorikan baik, selanjutnya aspek desentralisasi menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa cukup mampu mengarahkan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan dan aspek manajemen demokrasi menunjukkan pengawasan tidak efektif. Partisipasi masyarakat di Desa Latugho secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat saat melakukan perencanaan. Dimana

masyarakat menunjukkan antusias yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan pengajuan ide-ide saat ikut rapat. Selanjutnya dari partisipasi pelaksanaan, masyarakat menunjukkan partisipasi secara materi tetapi partisipasi secara tenaga tergolong rendah.

Penelitian oleh (Langit, 2017) “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dalam Pengembangan Desa Wisata Budaya” Universitas Brawijaya. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintahan Desa. Keberhasilan dan kegagalan Desa tersebut tidak lepas dari pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Desa tersebut. H. Dasuki adalah Kepala Desa Jono yang menjabat mulai tahun 2007-2018. Dengan kepemimpinannya tersebut, beliau berhasil menjadikan Desa Jono sebagai Desa Wisata Budaya pada tahun 2010. Dasuki sebagai kepala Desa melakukan pengembangan Desa wisata Budaya. melalui upaya pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, promosi dan pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Jono adalah pemimpin yang kharismatik dengan menggunakan gaya kepemimpinan demokratik. Hasil tersebut didapatkan dari beberapa indikator yang dijadikan bahan penelitian, yaitu : pemimpin bertindak sebagai koordinator dan intergrator, melihat perbedaan-perbedaan yang ada namun tetap menjamin kebersamaan, memperlakukan bawahan dengan cara yang manusiawi,

memperlakukan organisasi sebagai wahana untuk mencapai tujuan bersama, mendisiplinkan bawahannya dengan cara korektif dan edukatif, mendengarkan pendapat, saran bahkan kritik dari bawahan dan selalu menunjukkan penghargaan kepada para bawahan yang berprestasi tinggi.

Dalam kesepuluh penelitian tersebut dapat diambil hal menarik bahwa kesepuluh penelitian tersebut bersangkutan tentang gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan berbeda-beda sesuai dengan pribadi atau gaya pemimpin itu sendiri. Gaya kepemimpinan yang sudah dikatakan baik, dimana pegawai atau bawahannya dapat menjalankan tugas dengan baik. Gaya kepemimpinan yang dikatakan belum berjalan dengan baik, dimana bawahannya masih banyak yang menyimpang atau melanggar aturan-aturan. Maka dari itu gaya kepemimpinan sangat berpengaruh dalam meningkatnya pemberdayaan ekonomi.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya, memang ada kesamaan tema tentang gaya kepemimpinan dengan apa yang hendak saya teliti, bahwasannya gaya kepemimpinan Kepala Desa Krakitan apakah menunjukkan sudah berhasil atau sebaliknya. Karena gaya kepemimpinan seorang pemimpin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Pada penelitian yang hendak saya teliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Perbedaan mengenai objek yang diteliti dan perbedaan penelitian ini menggunakan teori birokrasi dan demokrasi kepemimpinan ini biasanya diterapkan pada sebuah instansi yang berdampak efektif, jika para pegawai

dapat mengikuti setiap langkah-langkah prosedur maka akan dapat melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Gaya Kepemimpinan

Gaya pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “style” yang berarti mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi ciri khas orang tersebut. Gaya kepemimpinan merupakan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan, kepemimpinan merupakan potensi untuk membuat orang lain (yang dipimpin) mengikuti apa yang dikehendaki pemimpinnya menjadi realita (Pasolog, 2013).

Gaya kepemimpinan merupakan sebuah aspek penting dalam mencapai dan meningkatkan suatu keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Setiap pemimpin pastinya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Menurut Thoha, 2013 menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat.

Sedangkan menurut Rivai, 2014 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin

untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpinnya. Gaya kepemimpinan juga menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.

Berdasarkan beberapa pengertian yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan serta mengendalikan bawahannya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Macam-macam Gaya Kepemimpinan Menurut Kartono (2013) menjelaskan bahwa pengukuran gaya kepemimpinan dapat dilihat dari:

a. Kemampuan Mengambil Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

b. Kemampuan motivasi

Kemampuan memotivasi merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya dalam membentuk keahlian maupun ketrampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menjalankan kewajibannya, dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan.

c. Kemampuan komunikasi

Kemampuan komunikasi merupakan kecakapan maupun kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara langsung lisan ataupun tidak langsung.

d. Kemampuan Mengendalikan Bawahan

Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada

tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya ialah supaya tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik.

e. Tanggung jawab

Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

f. Kemampuan Mengendalikan Emosional

Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosi semakin mudah menggapai kebahagiaan (Kartono & Kartini, 2010).

Teori kepemimpinan dalam literatur terdapat beberapa macam teori dan masing-masing literatur saling melengkapi. Di antara literatur yang dapat membahas tipe kepemimpinan yang dapat digunakan oleh seseorang pemimpin dalam kepemimpinannya adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan Transformasi

Istilah transformasi berasal dari kata *transformare* dalam Bahasa latin, berarti “mengubah sifat, fungsi. Atau kondisi untuk mengkonversi”. Dan konsep transformasi dapat

diterapkan untuk berbagai entitas: hubungan, individu, kelompok, tim, komunitas, atau politik sistem. Sedangkan istilah lain, transformasional berasal dari kata *to transform*, yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Misalkan mentransformasikan visi menjadi realita, atau mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Transformasional mengandung makna sifat-sifat yang dapat mengubah sesuatu menjadi bentuk lain, misalnya mengubah *energy potensial* menjadi *energy actual* atau motif berprestasi menjadi prestasi riil. Kepemimpinan transformasional (transformational leadership) istilah transformasional berinduk dari kata *to transform*, yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Dengan demikian, bahwa hakikat kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang dalam mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sumber daya dimaksud biasanya berupa sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan faktor eksternal organisasi. menurut Avolio, Bass and Jung, pada awalnya kepemimpinan transformasional ditunjukkan tiga perilaku, yaitu kharisma, konsiderasi, individual dan stimulasi intelektual. Namun dalam

perkembangannya, perilaku kharisma kemudian menjadi dua, yaitu karisma atau idealisasi pengaruh dan motivasi inspirasional. Secara empiris bahwa pada praktiknya antara perilaku karismatik dan motivasi inspirasional tidak dapat dibedakan secara tetapi perbedaan konsep antara kedua perilaku tersebut membuat kedua faktor di atas dapat dipandang sebagai dua hal yang berbeda. Dengan demikian, pada perkembangan berikutnya, kepemimpinan transformasional diuraikan dalam empat ciri utama, yaitu: idealisasi pengaruh, motivasi inspirasional, konsiderasi individual, dan stimulasi intelektual (B.J, B.M , & D.I. , 1999). Adapun definisi rincian masing-masing ciri utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Idealisasi pengaruh (idealized influence)

Idealisasi pengaruh adalah perilaku yang menghasilkan standar perilaku yang tinggi, memberikan wawasan dan kesadaran akan visi, menunjukkan keyakinan, menimbulkan rasa hormat, bangga dan percaya, menumbuhkan komitmen dan unjuk kerja melebihi ekspektasi, dan menegakkan perilaku moral yang etis.

Pemimpin memiliki idealisasi pengaruh akan menunjukkan perilaku antara lain: mengembangkan kepercayaan bawahan kepada atasan, membuat

bawahan berusaha meniru perilaku dan mengidentifikasi diri dengan pimpinannya, menginspirasi bawahan untuk menerima nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip bersama, mengembangkan visi bersama, menginspirasi bawahan untuk mewujudkan standar perilaku secara konsisten, mengembangkan budaya dan ideology organisasi yang sejalan dengan masyarakat pada umumnya, dan menunjukkan rasa tanggung jawab sosial dan jiwa melayani yang sejati

2. Motivasi inspirasional (inspirational motivation)

Motivasi inspirasional adalah sikap yang senantiasa menumbuhkan tantangan, mampu mencapai ekspektasi yang tinggi, mampu membangkitkan antusiasme dan motivasi orang lain, serta mendorong intuisi dan kebaikan pada diri orang lain. Pemimpin mampu membangkitkan semangat anggota tim melalui antusiasme dan optimisme. Pemimpin juga memanfaatkan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting dengan cara sederhana. Pemimpin yang memiliki motivasi inspirasional mampu meningkatkan motivasi dan antusiasme bawahan, membangun kepercayaan diri

terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan mencapai secara kelompok.

3. **Konsiderasi individual (individualized consideration)**

Konsiderasi individual adalah perilaku yang selalu mendengarkan dengan penuh kepedulian dan memberikan perhatian khusus, dukungan, semangat, dan usaha pada kebutuhan prestasi dan pertumbuhan anggotanya. Pemimpin transformasional memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan individu dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang mereka harapkan dengan berperilaku sebagai pelatih atau mentor. Bawahan dan rekan kerja dikembangkan secara suksesif dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki. Konsiderasi ini sangat mempengaruhi kepuasan bawahan terhadap atasannya dan dapat meningkatkan produktivitas bawahan. Konsiderasi ini memunculkan antara lain dalam bentuk memperlakukan bawahan secara individu dan mengexpresikan penghargaan untuk setiap pekerjaan yang baik.

4. **Stimulasi intelektual (intellectual stimulation)**

Stimulasi intelektual adalah proses meningkatkan pemahaman dan merangsang timbulnya cara pandang baru dalam melihat permasalahan, berpikir, dan

berimajinasi serta dalam menetapkan nilai-nilai kepercayaan. Dalam melakukan kontribusi intelektual melalui logika, analisa, dan rasionalitas, pemimpin menggunakan simbol sebagai media sederhana yang dapat diterima oleh pengikutnya. Melalui stimulasi intelektual pemimpin transformasional dapat merangsang tumbuhnya inovasi dan cara-cara baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Melalui proses stimulasi ini akan terjadi peningkatan kemampuan bawahan dalam memahami dan memecahkan masalah, berpikir, dan berimajinasi, juga perubahan dalam nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Perubahan ini bukan saja dapat dilihat secara langsung, tetapi juga perubahan jangka panjang yang merupakan lompatan kemampuan konseptual, pemahaman dan ketajaman dalam menilai dan memecahkan masalah.

- b. Menurut Sondang P. Siagian, ada lima tipe kepemimpinan yang diakui keberadaanya yaitu: (1) Tipe Otokratis, (2) Tipe Paternalistik, (3) Tipe Kharismatik, (4) Tipe Laisser Faizer, (5) Tipe Demokratis. (Siagian, 2003)
- c. Menurut M. Ngalim Purwanto, ada tiga tipe kemimpinan yaitu: (1) Kepemimpinan Otoriter, (2) Kepemimpinan Lisser Faizer, (3) Kepemimpinan Demokratis. (Purwanto, 2004).

Keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahan banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka tentang macam-macam gaya kepemimpinan, adalah sebagai berikut:

Gaya kepemimpinan menurut pendapat Hasibuan,2007 menjelaskan tiga bagian, yaitu:

a. Kepemimpinan otoriter

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Orientasi kepemimpinannya difokuskan hanya untuk peningkatan produktivitas kerja dengan kurang memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan.

Kekuasaan otoriter ini dilaksanakan dengan kekuasaan berada di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang diantara mereka selalu ada seseorang yang menempatkan diri sebagai yang paling berkuasa.

Dampak dari kepemimpinan otoriter yang dilaksanakan secara ekstrim pada suatu organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Anggota organisasi cenderung pasif, bekerja menunggu perintah, tidak berani mengambil keputusan dalam memecahkan masalah, karena semua tergantung atas keputusan pemimpin
- b. Anggota organisasi tidak ikut berpartisipasi aktif bukan berarti karena tidak mempunyai ide atau tidak mau berpendapat, melainkan karena takut dianggap sebagai pembangkang oleh pemimpin
- c. Kepemimpinan otoriter mematikan kreativitas dan inisiatif anggota sehingga berdampak pada kehidupan status pada organisasi
- d. Pemimpin otoriter tidak membina dan tidak membangkang potensi kepemimpinan dalam diri anggota organisasinya. Sehingga berakibat sulitnya memperoleh pemimpin pengganti jika diperlukan.
- e. Disiplin, rajin dalam bekerja dan patuh terhadap atasan adalah sikap yang cenderung pura-pura karena takut pada sanksi atau hukuman. Hal ini membuat banyak anggota menjadi penjilat untuk menyenangkan atasan
- f. Secara diam-diam akan memunculkan kelompok penentang yang menunggu kesempatan untuk menghambat atau bahkan menggagalkan kepemimpinan atasan yang bersikap otoriter

- g. Tidak ada rapat, musyawarah, diskusi dalam bekerja karena dianggap membuang waktu
- h. Disiplin diterapkan secara ketat dan kaku

Teori Kepemimpinan terbagi menjadi 3, yakni:

- a. Teori Genetik, yakni teori yang menjelaskan seorang pemimpin terlahir mempunyai suatu bakat yang telah terpendam pada diri seorang.
- b. Teori Sosial, yakni teori yang menjelaskan seseorang bisa sebagai pemimpin dengan melewati setiap tahap latihan, suatu pendidikan dan kesempatan.
- c. Teori Ekologis, yakni gabungan dari dua teori tersebut.

Sifat Pemimpin terbagi menjadi 5, antara lain:

- a. Intelejensi, yakni kemampuan dalam berbicara, menafsirkan, dan memiliki skill yang lebih kuat dari bawahannya.
- b. Kepercayaan Diri, yakni kepercayaan pada kompetensi serta keterampilan yang dimiliki seorang pemimpin itu sendiri.
- c. Determinasi, yakni hasrat guna menyelesaikan suatu pekerjaan yang mencakup beberapa ciri seperti inisiatif, keberanian, dan mempengaruhi bawahannya.

- d. Integritas, yakni kejujuran dan amanah atau dapat dipercayai oleh bawahannya.
- e. Sosiabilitas, yakni keinginan untuk melakukan hubungan yang ramah, bijaksana serta bersahabat.

Keahlian Administratif Dasar Seorang Pemimpin:

- a. Keahlian Teknis, yakni keterampilan analisis serta mengenakan alat dan juga teknik yang benar dan tepat.
- b. Keahlian Konseptual, yakni keterampilan untuk bekerja dengan memiliki suatu gagasan dan juga konsep.
- c. Keahlian Manusia, yakni keterampilan untuk bekerjasama, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan orang lain.

Gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi:

- a. Kepemimpinan Birokrasi, yakni kepemimpinan ini biasanya diterapkan pada sebuah instansi yang berdampak efektif, jika para pegawai dapat mengikuti setiap langkah-langkah prosedur maka akan dapat melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya.
- b. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Indrawijaya dalam Rivai (2014) “gaya kepemimpinan demokratis pada umumnya berasumsi bahwa pendapat orang banyak lebih baik dari pendapatnya sendiri dan adanya partisipasi akan menimbulkan tanggung jawab bagi

pelaksanaannya. Asumsi lain bahwa partisipasi memberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengembangkan diri mereka.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin yang demokratis mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan masukan dari seluruh anggota organisasi. Akan tetapi dalam setiap pengambilan keputusan pemimpin harus dapat mengacu pada tujuan organisasi dengan mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang tersedia. Pemimpin yang demokratis selalu bersikap merakyat dengan seluruh anggota organisasi. Hubungannya dengan para anggota bukan seperti hubungan antara majikan dan bawahannya saja, melainkan sebagai pemimpin yang selalu bersikap kekeluargaan, dimana dapat menjadi kakak terhadap saudara-saudaranya.

Setiap tindakan yang dilakukan selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan bersama dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan setiap anggota organisasi. Setiap masukan ataupun kritikan dari para anggota organisasi selalu dijadikan umpan balik dan bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian pemimpin yang demokratis dapat dikatakan memberikan

kepercayaan penuh kepada bawahannya bahwa mereka mempunyai kemampuan dalam melaksanakan setiap tugas ataupun pekerjaan yang diberikan.

Rivai (2014) Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki seseorang dalam kepemimpinan demokratis, diantaranya: dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia; selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya; senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritikan dari bawahannya; selalu berusaha mengutamakan kerja sama dan *teamwork* dalam usaha pencapaian tujuan; ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama; tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain; selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya; dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Disamping itu, pemimpin yang demokratis selalu berusaha memupuk rasa kekeluargaan, persatuan dan

solidaritas, serta selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada semua anggota organisasi dalam menjalankan dan mengembangkan daya kerjanya. Agar setiap anggota organisasi memiliki kecakapan dalam memimpin, seorang pemimpin yang demokratis selalu memberikan kesempatan kepada semua anggota organisasi dengan jalan pendelegasian sebagian kekuasaannya dan sebagian tanggung jawabnya.

Menurut Sudriamunawar dalam Ariani (2015) Adapun ciri-ciri seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis antara lain:

- a. Semua kebijakan dirumuskan melalui musyawarah dan diputuskan oleh kelompok, sedangkan pemimpin mendorong.
- b. Ditetapkan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kelompok. Apabila diperlukan saran teknis, pemimpin mengajukan beberapa alternatif untuk dipilih.
- c. Setiap anggota bebas bekerja sama dengan siapapun dan pembagian tugas diserahkan kepada kelompok.

Adapun indikator gaya kepemimpinan demokratis yang telah disesuaikan dengan ciri-cirinya menurut Pasolong dalam Ariani (2015) diantaranya adalah:

- a. Keputusan dibuat bersama

Pemimpin yang demokratis tidak sungkan untuk terlibat bersama-sama dengan bawahan untuk membuat keputusan serta melakukan aktivitas kerja demi pencapaian tujuan organisasi.

b. Menghargai potensi setiap bawahannya

Kepemimpinan demokratis menghargai setiap potensi individu dan bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat dan kondisi yang tepat.

c. Mendengar kritik, saran/pendapat dari bawahan

Mendapat kritikan, saran/pendapat dari bawahan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan organisasi. Dengan demikian akan ada kecenderungan untuk lebih meningkatkan potensi diri dan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya serta belajar dari kesalahan yang telah dilakukan.

d. Melakukan kerjasama dengan bawahannya.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bekerja sama/ terlibat langsung secara bersama-sama dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin juga tidak sungkan untuk terjun langsung kelapangan untuk menjalankan tugas. (Ariani, 2015)

1.5.2 Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Desa dalam definisi universal, merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rural). Di Indonesia, pengertian desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah sebuah kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya yang disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala BPD, kepala desa wajib memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat untuk menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban tersebut. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa atau pilkades oleh penduduk setempat.

Kewenangan kepala desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Daerah (BPD)
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Kepala Desa dan Perannya

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau

disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya UU No 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepala Desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dengan demikian, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa meliputi urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa memiliki sumber pendapatan

yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.

Di dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dalam menjalankan tugas tersebut, maka Kepala desa memiliki fungsi diantaranya:

1. Menggerakkan potensi masyarakat
2. Melaksanakan tugas dan pemerintah atasannya
3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa
4. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan masyarakat. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas mereka masing-masing.

c. Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin

Kepala Desa harus mempunyai kemampuan, bakat, kecakapan, dan juga jiwa kepemimpinan, disisi itu dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas, maka kepala desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Seperti yang dijelaskan oleh Atmosudirjo,2002 bahwa seorang pemimpin harus mempunyai empat syarat pokok, diantaranya:

1. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan daripada orang di sekitarnya yang dia ketahui mempunyai

banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang di emban.

2. Pemimpin harus menjadi teladan di lingkungannya, paling tidak harus menyadari bahwa kekurannya menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang di instruksikan kepada bawahannya.
3. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, dalam hal ini seorang pemimpin harus cakap, mampu dan pandai dalam mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Republik Indonesia. Taliziduhu Ndraha,2003 menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua sub konsep yang hubungannya satu dengan yang lain, yaitu konsep kepemimpinan bersistem nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal. Setiap saat, seorang pemimpin formal atau kepala yang berkepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat. Ia harus memilih peran, sebagai kepala atau sebagai pemimpin. Dilihat dari sudut pandang itulah, pada saat seseorang melakukan peran, ia harus mempertimbangkan peran yang lain. Peran apa yang akan mendukung peran apa, peran mana yang dapat menghambat peran mana, peran apa *conflicting* dengan peran apa dan yang lainnya.

Kepala desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kepemimpinan kepala desa sangatlah dibutuhkan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pembangunan desa (Safitri, 2019). Menurut Trisanto, 2011 menjelaskan bahwa salah satu tugas kepala desa urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. Salah satu tugas

dari seorang kepala desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.5.3 Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) menurut Kartasasmita (1996), adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan. Menurut Aziz (2009) pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat., sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan suatu kelompok lemah di masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dibahas di sini adalah pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemberian bantuan oleh suatu organisasi kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk bisa berkembang dan mandiri. Organisasi di sini dapat dalam bentuk instansi pemerintah, semi pemerintah, maupun perusahaan swasta. Pihak lain yang diberdaya bisa orang secara individu, keluarga, ataupun unit usaha. Pemberian bantuan, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dapat dalam bentuk pelatihan, Pendidikan, uang untuk modal usaha, ketrampilan maupun berbagai kesempatan promosi.

1.5.4 Ekonomi Masyarakat

Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun desa (Mubyarto, 1996). Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah

untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan (Sumodiningrat, 1998).

Produksi, distribusi dan konsumsi, merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi) harus dinikmati (konsumsi), dan sebaliknya yang menikmati harus yang menghasilkan (Sumodiningrat, 1998).

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apapun yang dapat dikuasainya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

1.6 Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Gaya kepemimpinan adalah sifat yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri guna mempengaruhi bawahannya atau organisasinya untuk mencapai tujuan yang telah disetujui secara bersama-sama.
- b. Pemberdayaan ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apapun yang dapat dikuasanya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.

1.7 Definisi Operasional

Adapun Definisi Operasional yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengukur suatu variable dengan menggunakan indikator-indikator tertentu untuk menjabarkan teori tentang kepemimpinan transformatif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Avolio, Bass dan Jung yaitu:
 1. Idealisasi pengaruh (*Idealized Influence*)
 2. Motivasi inspirasional (*Inspirational Motivation*)
 3. Konsiderasi Individual (*Individualized Consideration*)
 4. Stimulasi intelektual (*Intelectual Stimulation*)

1.8 Metode Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi. yang dilakukan oleh Kepala Desa

ini dapat menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Karena metode kualitatif merupakan penelitian dengan riset yang bersifat diskriptif dan condong menggunakan analisis. Analisis tersebut di dapatkan dengan studi langsung ke lapangan dengan tujuan dapat memberikan gambaran yang umum tentang peristiwa apa yang telah terjadi dan bagaimana kita menganalisisnya.

1.8.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi-kualitatif. Menurut Nazir (1988: 63) menyatakan bahwa metode deskriptif yakni suatu metode didalam penelitian status kelompok, obyek, suatu set kondisi, dan suatu system pikiran ataupun suatu peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini. Tujuan penelitian deskriptif yakni guna membuat suatu gambaran yang sistematis, deskripsi sesuatu, akurat mengenai suatu fakta yang terjadi, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

Menurut Hadari Nawawi (1987) menyatakan bahwa metode deskriptif yakni prosedur penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti dengan cara menggambarkan kondisi obyek atau subyek penelitian antara lain individu seseorang, lembaga, organisasi, dan masyarakat pada era sekarang berdasarkan fakta yang terjadi.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Klaten tepatnya di Desa Krakitan Kecamatan Bayat. Lokasi penelitian tersebut memungkinkan untuk mendapat banyak data-data akurat yang akan diteliti. Di lokasi penelitian tersebut narasumber yang di wawancarai memungkinkan bahwa memiliki informasi yang akurat dan pasti. Dan juga dapat mencari informasi gaya kepemimpinan seorang kepala desa serta cara dan tahapan dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.8.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua sumber data yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015) yakni sumber data yang langsung dapat diperoleh kepada pencari data. Data primer pada penelitian ini didapatkan langsung dari lokasi penelitian melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan Gaya Kepemimpinan Camat Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono (2015) yakni sumber data yang tidak didapatkan secara langsung dan tidak langsung diberikan pada pencari data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder juga bisa didapatkan dari perpustakaan dan dari laporan yang sudah diteliti dahulu. Data sekunder penelitian ini yakni data mengenai kondisi Desa Krakitan dan juga data pendukung lainnya

1.8.4 Unit Analisis Data

Untuk unit analisis data pada penelitian ini peneliti hendak mencoba mencari informan yang sesuai yaitu seseorang yang memberikan suatu informasi yang sesuai dan yang dibutuhkan ketika peneliti mengawali aktifitas pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepala Desa Krakitan
- b. Perangkat Desa yang ada di Kantor Kantor Desa Krakitan,
- c. Masyarakat sekitar yang memiliki usaha UMKM

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Dari tiga tahap tersebut, penelitian yang akan dilakukan mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomimenggunakan Observasi, Wawancara Langsung, Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi menurut Supriyati (2011:46) yakni suatu metode untuk mencari dan mengumpulkan berbagai data penelitian yang dicari dengan sifat naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural. Dalam penelitian ini, yang hendak diamati peneliti yakni gaya kepemimpinan apa yang digunakan Desa Krakitan pada saat memimpin di Desa Krakitan dan bagaimana kepemimpinan camat tersebut dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.

b. Wawancara

Wawancara menurut Supriyati (2011:48), yakni teknik pengambilan suatu data dengan melalui pertanyaan yang ditanyakan secara langsung kepada informan atau responden yang diwawancarai. Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* (subjek sesuai tujuan). Iskandar (2009), penentuan subjek berdasarkan tujuan di lakukan untuk meningkatkan kegunaan informasi yang di dapatkan dari subjek yang kecil. Peneliti memilih

subjek yang mempunyai pengetahuan dan informasi tentang fenomena yang sedang di teliti, sehingga dapat mengungkapkan banyak informasi dan informan tersebut bisa sedikit banyak, bisa homogen sifatnya dan karakteristiknya juga bisa berubah Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan kriteria dengan urutan sebagai berikut .:

- 1) Kepala Desa Krakitan
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Tokoh Masyarakat
- 4) Masyarakat Desa Krakitan

c. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut Sugiyono (2015:240), yakni berupa catatan-catatan peristiwa yang sudah telah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau dari seorang. Dalam penelitian ini, yang hendak didokumentasi peneliti adalah saat Kepala Desa Krakitan melakukan kinerja di desa tersebut.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Data-data didapatkan akan dianalisis secara mendalam dari hasil pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sarwono (2006: 244) aktivitas pada menganalisis suatu data kualitatif antara lain:

- a. Reduksi Data (Reduction Data), yakni merangkum atau menyeleksi data-data utama dan terfokus pada data penelitian yang pokok. Data yang sudah direduksi dapat memberi suatu gambaran yang jelas, dan memudahkan peneliti guna mengumpulkan data yang lainnya.
- b. Penyajian Data (Data Display), yakni terbagi menjadi dua bagian, pertama adalah penyajian pertama dilaksanakan ketika penarikan beberapa kesimpulan dari hasil reduksi data penelitian yang diperoleh peneliti. Kedua adalah penyajian pada pembahasan saat penelitian yang berisi sekumpulan kesimpulan dari hasil reduksi dari fokus permasalahan penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan, yakni peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang ditelitinya, mulai dari awal ketika terjun ke lapangan dan ketika proses berlangsungnya penelitian.